

TINGKAT PENGUNGKAPAN MATERIALITAS DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN: STUDI KASUS PADA SEKTOR PROPERTI 2020

Vina¹ Carmel Meiden²

¹ Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.
Corresponding Author. Email: viinaa65@gmail.com

² Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.
Email: carmel.meiden@kwikkiangie.ac.id

Article Info

Article History:

Submission :

Revised :

Accepted :

Keywords:

Sustainability, Sustainability Report, Property,
GRI, Materiality Matrix

Citation:

Vina, Meiden, (2022). TINGKAT
PENGUNGKAPAN MATERIALITAS DALAM
LAPORAN KEBERLANJUTAN: STUDI KASUS
PADA SEKTOR PROPERTI 2020

DOI:

<https://doi.org/10.46806/ja.v10i1.xxx>

URL:

jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/xxx

Abstract

To improve the quality of a sustainability report, the concept of materiality can be emphasized as a guide in making a sustainability report that is in line with the company's economic, social and environmental issues. The theories used in this research are agency theory, legitimacy theory and stakeholder theory. This research uses 3 stages of research method, namely data reduction, data presentation and conclusion. In this study, 15 2020 sustainability reports published by companies in Indonesia were analyzed to examine how materiality analysis is carried out in the property, real estate and building construction sectors. It was found that there were variations of 1-5 keywords in the definition of materiality, 6-9 variations of stakeholders and 10-27 different material topics based on each company. The conclusion of this study shows that the definition of the main materiality issue in the sustainability report is the impact on economic, social, and environmental issues. The main stakeholders are Employees, Community, Government, and Shareholders. There are 8 main material topics according to property sector companies which are presented based on economic, social, and environmental issues.

1. Pendahuluan

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap aspek sosial dalam masyarakat maupun lingkungan tempat perusahaan tersebut berdiri. Setiap tindakan yang diambil perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial dalam masyarakat sebagai tanda perhatian perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. CSR atau disebut juga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan atau bisnis untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Bab V.

Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report adalah laporan rutin atau berkala (biasanya dipublikasi tiap tahun) yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai media yang digunakan perusahaan untuk mengukur dan menyampaikan setiap tindakan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan sebagai komitmen bisnis terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat. Pelaporan keberlanjutan menurut Standar Pelaporan GRI (2016) adalah praktik pelaporan organisasi secara terbuka mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya (positif atau negatif) terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Laporan Keberlanjutan berguna bagi perusahaan dari segala sektor maupun industri untuk memperkirakan dampak setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aspek sosial, lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Laporan keberlanjutan perusahaan biasanya berisi informasi-informasi dan atau data-data mengenai kinerja sosial, ekonomi, serta kinerja lingkungan perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan dampak positif dari bisnis untuk masyarakat sekitar. Setiap informasi dan data yang



disajikan dan disertakan dalam laporan keberlanjutan perusahaan merupakan informasi dan data yang merepresentasikan atau dapat menunjukkan kondisi perusahaan ditinjau dari sudut pandang konsep keberlanjutan.

1. Laporan Keberlanjutan yang baik adalah laporan keberlanjutan yang menggunakan dan menerapkan standar kerangka pelaporan keberlanjutan seperti GRI (Global Reporting Initiative) ataupun standar kerangka pelaporan keberlanjutan lainnya, seperti IR (Integrated Reporting oleh Integrated Reporting Council), dan lain sebagainya sehingga laporan keberlanjutan berguna bagi setiap pemegang kepentingan seperti manajer, eksekutif perusahaan, pemegang saham, analis dan calon investor untuk menilai perusahaan dengan cepat, dan adil karena menggunakan standar pelaporan yang sama. Setiap keputusan yang diambil oleh setiap pemegang kepentingan dalam suatu usaha tidak hanya memperhatikan informasi pada laporan keuangan saja, namun juga pada penilaian resiko dan peluang perusahaan berdasarkan informasi non-keuangan perusahaan yang terdapat dalam laporan keberlanjutan.

Perusahaan yang menyusun atau menyiapkan laporan keberlanjutan berdasarkan Standar Keberlanjutan menunjukkan bahwa laporan tersebut telah disusun dengan standar tertentu agar meningkatkan komparabilitas atau keterbandingan secara global yang transparan dan juga dapat memberikan gambaran lengkap serta seimbang tentang topik material dalam perusahaan kemudian dampak terkait yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan, serta bagaimana dampak-dampak tersebut dikelola oleh perusahaan. Setiap laporan yang disusun sesuai dengan Standar Keberlanjutan dapat diproduksi atau disampaikan sebagai laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, atau dapat merujuk informasi yang diungkapkan dalam berbagai lokasi dan format (misalnya, berbasis kertas atau elektronik) sesuai dengan yang disampaikan dalam Standar Pelaporan GRI (2016).

Materialitas adalah salah satu faktor penting yang perlu disertakan selama proses penyusunan dan publikasi laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan. Materialitas menurut Tuanakotta (2016), adalah dasar untuk penilaian resiko dan penentu luasnya prosedur audit. Setiap laporan keberlanjutan perlu mempertimbangkan faktor materialitas sehingga setiap data dan informasi yang disampaikan oleh perusahaan dalam laporan tersebut adalah semua data atau informasi penting yang dapat menggambarkan kondisi dan tanggung jawab perusahaan sebenar-benarnya sehingga setiap investor maupun calon investor dapat melihat dan membuat keputusan. Apabila perusahaan tidak memberikan informasi yang material kedalam suatu laporan sehingga tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya, maka hal tersebut dapat mengubah keputusan yang akan diambil oleh investor maupun calon investor sehingga mungkin akan merugikan pihak pemangku kepentingan.

Perusahaan dalam Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan memiliki peluang untuk berkontribusi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat sekitarnya melalui praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Aspek kemakmuran selalu dianggap penting dalam pembentukan suatu peradaban atau lingkungan masyarakat yang baik. Untuk mencapai tujuan agar memperoleh kemakmuran dalam masyarakat, perusahaan dalam sektor properti memiliki kesempatan dan peran yang sangat penting karena mampu menciptakan lingkungan hidup sekitar masyarakat yang baik dan layak untuk ditinggali dengan membangun setiap proyek yang dikerjakan namun tetap mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan hidup sebagai prioritas dalam proses pembangunannya.

Salah satu permasalahan yang dapat dilihat dari setiap laporan keberlanjutan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan adalah keberbagaian penggunaan standar dalam penentuan atau implementasi prinsip materialitas yang menyebabkan para pemangku kepentingan akan kesulitan dalam memahami laporan keberlanjutan yang seharusnya berfungsi untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan karena informasi yang terdapat dalam laporan dapat dipahami dengan mudah. Karena menurut GRI 101: Landasan (2016: 3) masalah keberbagaian tersebut, maka diciptakan standar-standar yang memiliki target pengguna secara global, sehingga setiap perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan di seluruh dunia dapat menggunakan standar yang sama dan memberi gambaran yang seimbang sehingga mempermudah para pemangku kepentingan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aryal (2017) terhadap 15 (lima belas) laporan keberlanjutan perusahaan penerbangan dari berbagai negara yang disusun berdasarkan GRI G4 menunjukkan bahwa terdapat beberapa pola berbeda dalam proses analisis materialitas terhadap objek penelitian, dan ditemukan bahwa laporan keberlanjutan yang diterbitkan perusahaan penerbangan kurang transparan dalam menunjukkan proses analisis materialnya. Kebanyakan laporan yang diteliti juga tidak mendefinisikan konsep materialitas dan tidak menyatakan kepada pembaca alasan perusahaan menjalankan proses analisis material. Meskipun objek yang diteliti adalah laporan yang disusun berdasarkan standar yang sama dan berasal dari industri yang sama,



ditemukan juga perbedaan dalam proses, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses analisis material.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana materialitas didefinisikan dalam laporan keberlanjutan perusahaan dalam sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan, untuk mengetahui pengaruh dan peran para pemangku kepentingan dalam penyusunan laporan keberlanjutan, serta untuk mengetahui masalah material utama yang dapat diidentifikasi melalui laporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan sektor terkait. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana materialitas didefinisikan melalui pengungkapan pada laporan keberlanjutan? (2) Bagaimana peran pemangku kepentingan dipertimbangkan melalui pengungkapan pada laporan keberlanjutan? (3) Apa masalah material utama yang diidentifikasi melalui pengungkapan pada laporan keberlanjutan oleh sektor properti?

Teori Pemangku Kepentingan

Stakeholder theory atau teori pemangku kepentingan ini tercipta karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan. Menurut Ghazali and Chariri (2014), teori pemangku kepentingan adalah teori yang menganggap setiap pemangku kepentingan perusahaan memiliki hak yang sama untuk mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya tanpa adanya data yang dimanipulasi atau ditutupi karena dukungan yang diberikan oleh para pemegang kepentingan dalam perusahaan memiliki peran penting dalam keberadaan suatu perusahaan. Manipulasi data perusahaan biasanya dilakukan oleh entitas dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaan yang mungkin sedang tidak baik sehingga kondisi perusahaan yang sebenarnya tidak dapat dilihat oleh investor maupun calon investor yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh investor atau calon investor.

Teori Legitimasi

Teori Legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975 yang menyatakan bahwa konsep legitimasi dianggap penting dalam proses analisis hubungan organisasi dan lingkungan sekitarnya. Menurut Uwuigbe et al. (2018), fokus dasar dari teori legitimasi adalah gagasan "kontrak sosial" yang meyakini bahwa kelangsungan hidup suatu usaha sebagian besar bergantung kepada sejauh mana perusahaan dapat berfungsi dalam batas-batas serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Karena sifat dalam masyarakat yang dinamis, maka suatu perusahaan atau institusi atau organisasi harus melalui uji legitimasi dan lolos uji legitimasi serta uji relevansi melalui usaha perusahaan untuk menyebarkan atau melakukan sosialisasi mengenai jasa atau peran perusahaan terhadap masyarakat dan atau kelompok tertentu yang telah menerima manfaat atau sumber daya yang diterima perusahaan benar-benar mendapat persetujuan dari masyarakat. Pandangan mengenai legitimasi organisasi dapat dilihat dari sudut pandang sebagai sesuatu yang berasal dari masyarakat untuk perusahaan dan juga adalah sesuatu yang diinginkan perusahaan dari masyarakat.

Teori Keagenan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Panda and Leepsa (2017), Teori Keagenan atau Teori Agensi yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 berfokus terhadap cara untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin akan timbul karena adanya pemisahan kepentingan antara pemilik usaha (*principal*) dengan manajer (*agent*) dengan cara mempraktikkan beberapa mekanisme kontrol untuk mengendalikan tindakan agen dalam perusahaan yang dimiliki bersama. Menurut Josua et al. (2020) permasalahan yang akan timbul dalam teori agensi atau yang biasa disebut dengan *Agency Problem*, apabila dapat diatasi artinya perusahaan mampu mewujudkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien, perusahaan dapat menerapkan prinsip-prinsip dan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabilitas, adil, bertanggung jawab serta mandiri.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Nayenggita, Raharjo and Resnawaty (2019), CSR adalah upaya atau usaha berupa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku bisnis melalui perilaku yang bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat dan berfokus terhadap 3 hal, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan dengan berbagai topik yang dapat dilaporkan. Topik-topik seperti informasi umum perusahaan, informasi keuangan perusahaan, dan lain sebagainya perlu dipilah sehingga hanya topik-topik yang penting dan relevan yang dianggap dapat mencerminkan kondisi perusahaan, dampak ekonomi, lingkungan dan sosial oleh perusahaan atau dapat mempengaruhi keputusan setiap pemangku kepentingan dalam perusahaan yang disertakan dan dilaporkan.

Dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan, konsep materialitas didefinisikan sebagai suatu prinsip yang menentukan atau sebagai ambang batas terhadap informasi atau data relevan mana yang perlu

untuk disertakan dalam laporan karena dianggap penting dan relevan dalam mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan perusahaan seperti investor. Tidak semua informasi atau topik material memiliki tingkat kepentingan yang sama serta tingkat penekanan dalam laporan diharapkan dapat mencerminkan prioritas relatif mereka.

Faktor internal serta faktor eksternal juga perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian apakah suatu topik termasuk bersifat material dan perlu disampaikan atau dilaporkan dalam suatu laporan keberlanjutan. Pertimbangan faktor internal dan eksternal dilakukan saat melakukan evaluasi terhadap topik yang dianggap penting dan mencerminkan dampak perusahaan atas faktor ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan yang berarti dampak atau faktor tersebut sudah menjadi focus perhatian oleh para ahli atau yang telah melalui proses identifikasi dengan metodologi penelitian atas dampak atau penilaian siklus hidup dan alat penilaian lainnya. Salah satu faktor terpenting yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep materialitas adalah perusahaan harus dapat menjelaskan setiap proses yang dilalui dalam penentuan prioritas topik material. Dalam konsep materialitas menurut (Standar Pelaporan GRI, 2016) topik material dapat diidentifikasi berdasarkan dua dimensi, yaitu:

- a. Pentingnya dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi; dan
 - b. Pengaruh substansial dampak-dampak itu terhadap penilaian dan keputusan para pemangku kepentingan.
- Dalam Standar Pelaporan GRI (2016), “dampak” yang dimaksud dalam penerapan konsep dan prinsip materialitas dalam pelaporan keberlanjutan mengacu terhadap efek atau pengaruh perusahaan terhadap faktor ekonomi, lingkungan dan atau masyarakat sehingga di masa depan kontribusi organisasi atau perusahaan (positif maupun negatif) terhadap pembangunan dalam konsep keberlanjutan dapat terindikasi.

Suatu laporan perlu memperhatikan konsep kelengkapan dalam hal praktik atas pengumpulan informasi, daftar topik yang dianggap material dalam laporan, batasan topik yang berisi keterlibatan perusahaan dan deskripsi lokasi yang terdampak dalam topik material, dan waktu yang merujuk kepada target jangka waktu penyelesaian rencana perusahaan yang disampaikan dalam laporan berdasarkan Standar GRI. Dalam pembuatan target jangka waktu atau estimasi dampak di masa depan yang dituliskan dalam laporan harus berdasarkan alasan yang dapat mencerminkan kemungkinan serta sifat dampak dan keterbatasan target waktu yang diakui diharapkan berguna dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemegang kepentingan.

Kemudian, Menurut Standar Pelaporan GRI (2016), salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam menentukan isi dan konten dalam laporan ialah inklusivitas Pemangku Kepentingan, yang menekankan bahwa organisasi pelapor harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab organisasi pelapor tersebut dalam hal pemenuhan harapan dan kepentingan yang masuk akal dari para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan merupakan salah satu pihak yang terdampak dan berdampak atas setiap kegiatan, produk, atau jasa perusahaan pelapor yang diperkirakan dapat mempengaruhi strategi atau proses pencapaian tujuannya. Saat organisasi atau perusahaan membuat keputusan tentang isi laporan, entitas perlu mempertimbangkan harapan atau ekspektasi dan kepentingan setiap pemangku kepentingan. Keterlibatan pemangku kepentingan dapat dipakai sebagai ukuran untuk memahami harapan para pemangku kepentingan, dan kebutuhan informasi setiap pemangku kepentingan.

Keterlibatan pemangku kepentingan dapat dilakukan berdasarkan pendekatan yang diakui secara umum, sistematis, metodologi, serta prinsip-prinsipnya dapat diterapkan untuk memaparkan proses persiapan laporan. Keterlibatan para pemangku kepentingan yang dilaksanakan dan berjalan dengan baik, dan sistematis, kemungkinan dapat menghasilkan pembelajaran yang berkelanjutan untuk organisasi atau perusahaan serta meningkatkan nilai akuntabilitas organisasi atau perusahaan sehingga hubungan kepercayaan antara pemangku kepentingan dengan organisasi semakin kuat, yang akhirnya akan memperkuat kredibilitas laporan yang diterbitkan perusahaan. Dalam proses penentuan untuk memilih topik yang dianggap material, organisasi atau perusahaan perlu mempertimbangkan aspek kepentingan serta harapan para pemangku kepentingan yang telah berinvestasi maupun akan berinvestasi dalam perusahaan, seperti karyawan dan pemegang saham, yang memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan di masa depan.

Adapun menurut Standar Pelaporan GRI (2016), pengaruh yang dapat dihasilkan oleh para pemangku kepentingan yang diperkirakan mampu mempengaruhi kondisi finansial perusahaan dalam jangka menengah hingga jangka panjang atau mempengaruhi kondisi kinerja operasional perusahaan (menciptakan pengaruh jangka pendek yang cukup signifikan) seperti perusahaan kehilangan ijin untuk beroperasi, reputasi perusahaan yang rusak, perubahan permintaan konsumen, dan gangguan-gangguan lainnya terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Atas hal tersebut, dalam Standar GRI dituliskan bahwa adalah penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dan menyertakan inklusivitas pemangku kepentingan dalam proses penyusunan laporan

keberlanjutan karena setiap informasi yang tersedia dalam laporan keberlanjutan memungkinkan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk membentuk opini dan mengambil keputusan terinformasi mengenai kontribusi perusahaan atau organisasi terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan. Berbagai standar keberlanjutan telah dirancang dan disusun sedemikian rupa oleh ahlinya untuk memungkinkan perusahaan merespons secara komprehensif dan seimbang terhadap masalah material, dampak, serta peluang dan menghasilkan laporan yang dapat berguna bagi pemangku kepentingan.

Dalam laporan keberlanjutan oleh sektor properti, prinsip keterlibatan pemangku kepentingan diterapkan melalui uji materialitas berdasarkan standar keberlanjutan seperti yang dituliskan oleh Global Reporting Initiative (GRI), 2016), tentang proses penentuan isi laporan dan topik material serta batasan dalam laporan yang disampaikan melalui 4 tahapan proses, yaitu:

a. Tahap identifikasi

Tahap identifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama perusahaan dan daftar topik keberlanjutan yang mungkin relevan dalam laporan sesuai standar yang ada.

b. Tahap analisis

Penilaian atas setiap topik yang telah diidentifikasi oleh perusahaan yang berkaitan dengan dampak atas faktor ekonomi, lingkungan dan sosial secara umum.

c. Tahap validasi

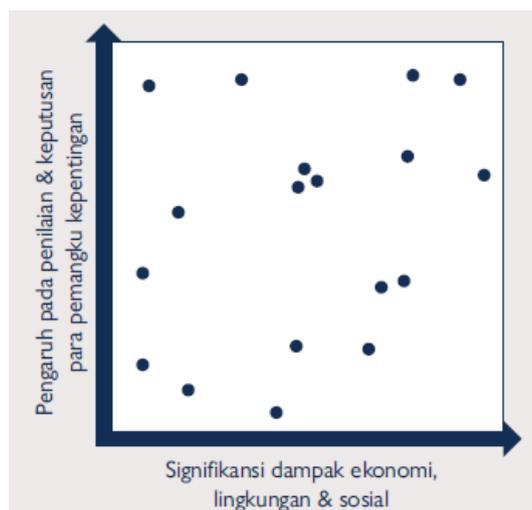
Melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang relevan melalui pertemuan serta diskusi untuk proses validasi hasil analisis.

d. Tahap penentuan prioritas

Penyusunan topik material dipilih berdasarkan tingkat kepentingannya atas strategi perusahaan dan ekspektasi para pemangku kepentingan dalam perusahaan.

Perusahaan dari sektor yang berbeda kemungkinan besar memiliki prioritas masalah material yang juga berbeda karena perbedaan sektor perusahaan sehingga tantangan yang dihadapi dan tanggung jawab yang dimiliki juga berbeda. Misalnya, Perusahaan dalam sektor industri Makanan dan Minuman mungkin memiliki topik material dan batasan terkait topik material yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan sektor keuangan karena tanggung jawab, tantangan, serta pasar perusahaan yang berbeda mengakibatkan topik yang dianggap material oleh perusahaan juga berbeda.

Prioritas atas topik atau masalah utama yang material bagi setiap perusahaan dipertimbangkan atas 2 pilar yaitu berdasarkan pengaruh pada penilaian & keputusan para pemangku kepentingan serta signifikansi dampak ekonomi, lingkungan & sosial oleh perusahaan. Sehingga berdasarkan 2 pilar tersebut, perusahaan mampu menentukan prioritas atau masalah utama masing-masing yang mungkin berbeda-beda. Kedua pilar prioritas dalam tahap penentuan topik yang material tersebut dapat digambarkan kedalam bentuk matriks/matrix seperti berikut:



Gambar 1. Representasi visual dari penentuan prioritas topik
Sumber: GRI 101: Landasan (2016: 11)

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang menurut (Hardani et al., 2020), berfokus pada masalah dalam penelitian yang diharapkan dapat

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dikembangkan dan dipaparkan sesuai dengan kenyataan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan yang bergerak dari fakta, data atau informasi maupun peristiwa menuju ke tingkat abstraksi yang selanjutnya dari teori ke data atau informasi. Objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan-perusahaan dalam sector properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI paling lambat sejak kuartal pertama (Q1) 2019 dan telah menerbitkan laporan keberlanjutan untuk tahun 2020 pada laman atau *website* resmi perusahaan atau BEI.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi data sekunder berupa laporan keberlanjutan perusahaan dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* yang menurut (Sekaran and Bougie (2019) merupakan teknik yang populasinya tidak memiliki tingkat probabilitas (*probability rate*) yang melekat pada data untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Pendekatan dalam teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* berdasarkan *judgement sampling* yang proses pemilihan sampelnya harus adalah sampel yang sesuai dan memenuhi suatu syarat atau kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelum melakukan pengambilan sampel oleh peneliti.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 3 tahap menurut (Siyoto and Sodik, 2015), yaitu reduksi data yang merupakan proses untuk merangkum dan memilih data pokok serta fokus terhadap hal-hal penting yang kemudian dicari pola serta temanya untuk kemudian dapat memudahkan penulis dalam proses pengumpulan data selanjutnya akibat gambaran yang didapat penulis sudah jelas, tahap kedua adalah tahap penyajian data yang dijabarkan sesuai dengan bentuk informasi data terkait materialitas yang disertakan dalam masing-masing laporan keberlanjutan perusahaan sampel tahun 2020, dan tahap terakhir ialah tahap penarikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilaksanakan terkait analisis terhadap laporan keberlanjutan dalam topik materialitas, peran pemangku kepentingan masalah material utama dalam sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan.

3. Hasil dan Pembahasan

Tingkat Kepatuhan Laporan Keberlanjutan terhadap Standar Keberlanjutan

Keterangan	GRI 102	GRI 103-1	AA1000AP	Tingkat Kepatuhan rata-rata
ADHI	100%	66,67%	100%	88,89%
BEST	0%	0%	30%	10,00%
BKDP	75%	33,33%	90%	66,11%
BSDE	50%	33,33%	80%	54,44%
DMAS	0%	0%	20%	6,67%
DUTI	50%	33,33%	80%	54,44%
GWSA	0%	0%	20%	6,67%
PBSA	0%	33,33%	20%	17,78%
PPRO	100%	66,67%	90%	85,56%
PTPP	100%	100%	90%	96,67%
PWON	75%	66,67%	70%	70,56%
TOPS	100%	33,33%	90%	74,44%
TOTL	100%	100%	80%	93,33%
WIKA	50%	66,67%	90%	68,89%
WSKT	50%	66,67%	80%	65,56%

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan rata-rata terkait materialitas terhadap standar keberlanjutan
Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa dari 15 perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini dalam laporan keberlanjutannya terdapat perusahaan yang tidak menggunakan GRI sebagai standar penyusunan laporan dengan tingkat kepatuhan pada tabel rendah seperti PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk., PT Greenwood Sejahtera Tbk., dan PT Paramita Bangun Sarana Tbk. Dari 4 kriteria pada GRI 102 terkait laporan keberlanjutan dan proses yang berkaitan dengan materialitas seperti runtutan proses yang dilaksanakan untuk menentukan isi konten laporan dan batasan terkait topik materialitas (GRI 102-46-a), prinsip pelaporan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang dipakai untuk menentukan isi pelaporan (GRI 102-46-b), prinsip materialitas yang diaplikasikan untuk mengidentifikasi topik material (Klausul 6.1) dan daftar topik materialitas yang teridentifikasi (GRI 102-47), kriteria atau persyaratan yang paling banyak tidak dipatuhi adalah penulisan prinsip materialitas yang dipakai perusahaan dalam menentukan topik keberlanjutan material dan batasannya.

Kemudian dari seluruh objek penelitian yang berjumlah 15 perusahaan, 7 dari 15 perusahaan telah menuliskan prinsip pelaporan yang dipakai dalam proses penyusunan laporan keberlanjutannya seperti prinsip inklusivitas pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan. Dari tabel 1 juga terlihat perusahaan yang patuh 100% terhadap 4 kriteria penyampaian proses terkait materialitas dalam laporan keuangan berdasarkan GRI 102. Dalam tabel 1, dapat dilihat bahwa dari 15 perusahaan sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan yang menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2020 terdapat 5 perusahaan yang menyertakan informasi terkait proses materialitas secara lengkap atau sebanyak 33,33% dari keseluruhan objek yang diteliti terkait laporan perusahaan dalam penelitian ini. Adapun 5 dari 15 perusahaan yang menyertakan informasi umum terkait topik materialitas dan batasannya dalam laporan keberlanjutan perusahaan tahun 2020 berdasarkan Standar GRI 102 adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PP Properti Tbk., PT Pembangunan Perumahan Tbk., PT Totalindo Eka Persada Tbk., dan PT Total Bangun Persada Tbk.

Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan objek penelitian pada laporan keberlanjutan tahun 2020 berdasarkan GRI 103-1, terdapat 3 kriteria yang dipakai untuk menganalisa kepatuhan setiap perusahaan dalam menyertakan informasi spesifik terkait topik material yang telah diidentifikasi menurut perusahaan. 3 kriteria tersebut adalah penjelasan alasan topik tersebut dianggap material oleh perusahaan (a), lokasi yang terdampak atas kegiatan perusahaan dan tindakan perusahaan terkait dampak tersebut yang dianggap material (b), dan batasan khusus terkait proses penyusunan laporan (c).

Ditemukan bahwa kriteria kedua mengenai lokasi yang terdampak atas kegiatan perusahaan dan tindakan perusahaan terkait dampak tersebut yang dianggap material adalah kriteria yang paling banyak dipatuhi oleh perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini. Sebanyak 12 dari 15 perusahaan menuliskan lokasi yang terdampak atas kegiatan operasional perusahaan dan tindakan perusahaan terkait dampak tersebut, artinya sebanyak 80% objek penelitian patuh terhadap syarat atau kriteria tersebut. 3 perusahaan yang tidak mencantumkan lokasi yang terdampak dan cara perusahaan mengatasi dampak dengan jelas adalah PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk., PT Puradelta Lestari Tbk., dan PT Greenwood Sejahtera Tbk. yang juga adalah 3 perusahaan dengan tingkat kepatuhan 0% berdasarkan tabel karena tidak mencantumkan topik keberlanjutan yang material menurut perusahaan dan proses penentuan materialitas dalam laporan keberlanjutannya.

Sedangkan kriteria yang paling sedikit dicantumkan dalam laporan keberlanjutan 15 perusahaan dalam sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan adalah penyertaan atau penulisan batasan khusus dalam laporan terkait proses penyusunan laporan. Dari 15 perusahaan, hanya 2 perusahaan yang dengan jelas menuliskan batasan khusus dalam laporan keberlanjutannya. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Pembangunan Perumahan Tbk., dan PT Total Bangun Persada Tbk. yang juga merupakan perusahaan dengan tingkat kepatuhan 100%, yang artinya kedua perusahaan tersebut mematuhi semua kriteria penyampaian terkait informasi spesifik tentang topik materialitas dan batasannya berdasarkan Standar GRI 103-1. Hanya 2 dari 15 perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan sebesar 100% terhadap 3 kriteria yang disyaratkan. Artinya, hanya 13,33% perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan 100% berdasarkan GRI 103-1. Kemudian, terdapat 5 perusahaan yang hanya memiliki tingkat kepatuhan 33,33% atau hanya mematuhi 1 kriteria yaitu kriteria kedua atau kriteria b. Adapun kelima perusahaan tersebut adalah PT Bukit Darmo Property Tbk., PT Bumi Serpong Damai Tbk., PT Duta Pertiwi Tbk., PT Paramita Bangun Sarana Tbk., dan PT Totalindo Eka Persada Tbk.

Di sisi lain, terdapat juga perusahaan yang hanya mematuhi 2 dari 3 kriteria berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan tingkat kepatuhan sebesar 66,67%. 5 dari 15 perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini memiliki tingkat kepatuhan sebesar 66,67% yang hanya mematuhi 2 kriteria yaitu kriteria terkait penyampaian alasan mengapa suatu topik dianggap material oleh perusahaan (a), dan kriteria terkait lokasi yang terdampak dan cara perusahaan mengatasi dampak tersebut (b) pada laporan keberlanjutan yang diterbitkan perusahaan untuk periode tahun 2020. 5 perusahaan tersebut ialah PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PP Properti Tbk., PT Pakuwon Jati Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., serta PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan analisis dengan GRI 103-1, dapat dihitung tingkat kepatuhan 15 perusahaan dalam sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan di Indonesia secara keseluruhan dengan cara menghitung nilai rata-rata atau *mean* dari tingkat kepatuhan (%) masing-masing perusahaan. Sehingga, dari seluruh tingkat kepatuhan 15 perusahaan dalam penelitian ini, tingkat kepatuhan rata-ratanya adalah sebesar 46,67%.

Terdapat 10 kriteria kepatuhan berdasarkan AA1000AP yang disusun sebagai panduan bagi perusahaan dalam menerapkan prinsip materialitas dan meninjau proses kemajuan penerapannya. 10 kriteria

tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian sesuai ruang lingkupnya, yaitu Pembangunan Komitmen, Integrasi, dan Kapasitas, Penerapan Materialitas, serta Komunikasi yang pemenuhannya mengarah pada kepatuhan terhadap prinsip materialitas menurut AA1000AP. Kriteria-kriteria ini juga dipakai oleh organisasi penyedia assurance terkait untuk melaksanakan penilaian terkait prinsip dalam organisasi atau perusahaan.

Dalam analisis yang dilakukan terkait penerapan prinsip materialitas pada Laporan Keberlanjutan berdasarkan AA1000AP, ditemukan bahwa kriteria 7 yang termasuk kedalam bagian penetapan materialitas yaitu terkait penentuan signifikansi, kemungkinan, dampak saat ini, hingga dampak yang diharapkan dimasa depan dari topik keberlanjutan material yang teridentifikasi sesuai kriteria dan ambang batas yang kredibel, jelas, serta mudah dipahami juga dapat ditiru, dipertahankan dan sesuai pada external assurance adalah kriteria yang paling sedikit dipatuhi. Kriteria tersebut hanya dipatuhi oleh 3 perusahaan dari 15 objek penelitian, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Bukit Darma Property Tbk., dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Artinya, hanya 20% yang menuliskan penentuan signifikansi, kemungkinan, dampak saat ini dan masa depan sesuai kriteria tertentu pada laporan keberlanjutan perusahaan tahun 2020.

Kriteria yang paling banyak dipatuhi adalah kriteria 4 yang juga termasuk kedalam bagian penetapan materialitas yaitu dalam penetapan batas yang jelas, konsisten, penulisan tujuan, periode waktu, serta ruang lingkup terkait penilaian materialitas. Kriteria ini dipatuhi oleh 15 dari 15 objek penelitian, artinya 100% perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini menyertakan batasan laporan yang jelas seperti periode waktu laporan, tujuan laporan keberlanjutan diterbitkan, serta ruang lingkup laporan. Dari analisis yang dilakukan, tingkat kepatuhan terkait penerapan prinsip materialitas menurut AA1000AP secara umum atau secara keseluruhan pada 15 perusahaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah sebesar 68,67%. Tingkat kepatuhan secara keseluruhan tersebut dihitung dengan cara menjumlahkan poin kepatuhan tiap perusahaan kemudian dibandingkan dengan 150 (total keseluruhan poin dari 15 perusahaan dan 10 kriteria), artinya poin kepatuhan perusahaan sample paling besar adalah 10 dan terendah adalah 0, dari tabel diatas jumlah poin kepatuhan keseluruhan objek penelitian adalah 103 poin.

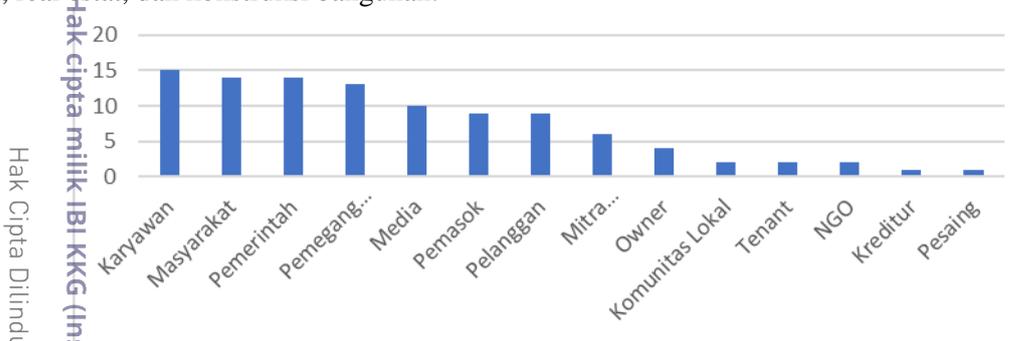
Dari ketiga analisis terhadap laporan keberlanjutan berdasarkan Standar Keberlanjutan seperti GRI dan AA1000, maka didapatkan tingkat kepatuhan rata-rata terkait materialitas yang bervariasi mulai dari 6,67% (GWSA dan DMAS) hingga 96,67% (PTPP) dengan total rata-rata tingkat kepatuhannya sebesar 57,33% untuk perusahaan dalam sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian, bagaimana materialitas didefinisikan melalui pengungkapan pada laporan keberlanjutan? Maka berdasarkan frekuensi penyebutannya, ditemukan total 13 definisi isu materialitas berdasarkan kata kunci menurut 12 perusahaan yang menyebutkan definisi materialitas dan 3 perusahaan yang tidak menyebutkan definisi materialitas.



Gambar 2. Definisi materialitas melalui pengungkapan pada laporan keberlanjutan
Sumber: Data diolah penulis

Dampak terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial adalah definisi isu materialitas utama karena merupakan definisi yang paling banyak dipakai dan disebutkan dalam 12 laporan keberlanjutan yaitu sebanyak 5 kali. Selain 3 definisi materialitas utama tersebut, definisi isu materialitas lainnya pada perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan adalah definisi kedua yang paling banyak disebutkan berdasarkan frekuensi penyebutannya adalah pengaruh pada penilaian, perhatian, dan keputusan pemangku kepentingan, pengurangan emisi, pengelolaan limbah dan sampah, serta pemberdayaan masyarakat yang disebutkan sebanyak masing-masing 2 kali. Kelompok definisi materialitas terakhir yang paling sedikit disebutkan dalam laporan keberlanjutan yaitu sebanyak 1 kali adalah dampak pada bisnis, kepentingan pemangku kepentingan, tujuan bisnis jangka panjang perseroan, Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Pencapaian tahun 2020, dan tantangan serta peristiwa penting yang terjadi.

Pertanyaan penelitian kedua tentang bagaimana peran pemangku kepentingan dipertimbangkan melalui pengungkapan pada laporan keberlanjutan dapat digambarkan pada gambar 3 dibawah yang menunjukkan pemangku utama yang diangkap memiliki kepentingan tingkat tinggi dalam perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan.



Gambar 3. Pemangku Utama yang paling banyak disebutkan dalam laporan keberlanjutan
Sumber: Data diolah penulis

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam laporan keberlanjutan adalah penerapan sesuai dengan teori pemangku kepentingan yang menganggap pentingnya peran pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Dalam melakukan identifikasi terhadap pemangku kepentingannya, secara garis besar, perusahaan dalam sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai pihak baik individu maupun kelompok yang berpengaruh dan terpengaruh oleh perusahaan. Beberapa perusahaan juga mengidentifikasi pemangku kepentingannya berdasarkan 6 atribut yang merujuk pada AA1000SES yaitu Dependency, Responsibility, Tension, Influence, Diverse Perspective, serta Proximity.

Keterlibatan pemangku kepentingan juga adalah prinsip Standar GRI dalam penyusunan laporan keberlanjutan karena peran pemangku kepentingan dianggap penting untuk keberlanjutan perusahaan. Dalam Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI: 101 Landasan (2016: 8), setiap keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan dalam perusahaan disampaikan dengan jelas dalam laporan keberlanjutan sebagai alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memahami harapan wajar dan kepentingan serta kebutuhan informasi setiap para pemangku kepentingan. Pelibatan pemangku kepentingan internal seperti pemegang saham, karyawan, dan manajemen lintas divisi, serta pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah, masyarakat, media, pemasok atau supplier, dan konsumen dijelaskan dalam laporan keberlanjutan.

Pemangku kepentingan yang teridentifikasi dari setiap laporan keberlanjutan yang diteliti dengan jumlah pemangku kepentingan yang berbeda dari 6-9 pemangku kepentingan dan setelah dikumpulkan ditemukan 14 tipe pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan utama yang teridentifikasi setelah dilakukan penelitian berdasarkan frekuensi penyebutannya diatas 10 kali adalah Karyawan (15), Masyarakat (14), Pemerintah (14), serta Pemegang Saham (13). Sedangkan pemangku kepentingan tipe sedang yaitu tipe pemangku kepentingan yang disebutkan sebanyak 6-10 kali adalah Media (10), dan Pemasok (9), serta Pelanggan (9) dan Mitra Kerja atau Mitra Bisnis (6). Dan tipe pemangku kepentingan terakhir yaitu tipe rendah adalah pemangku kepentingan yang frekuensi penyebutannya kurang atau sama dengan 5 kali, seperti Owner (4), Komunitas Lokal (2), Tenant (2), Non-Governmental Organization – NGO (2), Kreditur (1), serta Pesaing (1).

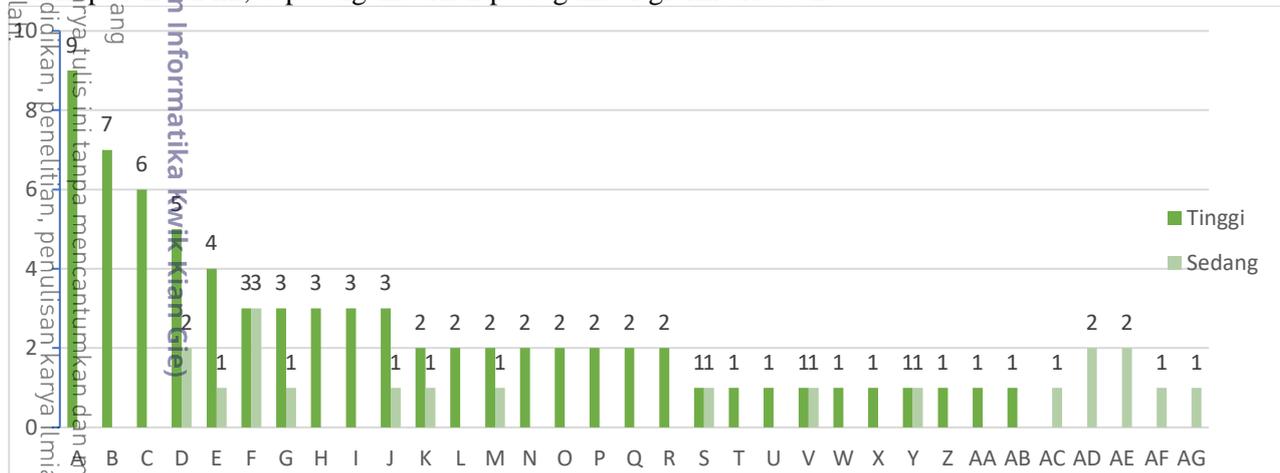
Dalam Standar (Global Reporting Initiative (GRI), 2016), perusahaan disarankan untuk menyatakan informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya dalam laporan keberlanjutan untuk memberikan wawasan atas skala dampak yang diciptakan oleh isu-isu ketenagakerjaan sebagai pemegang kepentingan dalam perusahaan yang memiliki peran penting dalam setiap kegiatan operasional dan produktivitas perusahaan. Masyarakat juga merupakan salah satu pemangku kepentingan utama karena merupakan pihak yang terpengaruh dan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan perusahaan. Pemerintah sebagai regulator dianggap sebagai pemangku kepentingan karena setiap kegiatan perusahaan harus mematuhi peraturan dan perundangan yang dibuat oleh pemerintah agar setiap kegiatan perusahaan dapat dijalankan dengan transparan dan beretika. Pemegang kepentingan utama terakhir yaitu pemegang saham atau shareholder yang berperan penting bagi perusahaan dalam menentukan nilai atau value suatu perusahaan.

Adapun pengungkapan pelibatan pemangku kepentingan dalam laporan keberlanjutan dibagi menjadi pelibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pelibatan pemangku kepentingan internal utama seperti pelibatan Karyawan dalam pelaksanaan survei, perjanjian kerja bersama, dan serikat pekerja serta, dan Pemegang saham dengan melaksanakan RUPS Tahunan dan Pelaporan triwulanan. Pelibatan pemangku

kepentingan eksternal utama seperti penerbitan laporan keuangan, tahunan, dan keberlanjutan yang sesuai dengan aturan Pemerintah. Keterlibatan pemangku kepentingan tipe sedang seperti Media dengan pelaksanaan press release, sosialisasi sistem pengadaan barang dan jasa dan apresiasi penghargaan bagi pemasok, dan Pelanggan dengan penyediaan laman atau *website* resmi perusahaan untuk konsumen menyampaikan umpan balik atau feedback kepada perusahaan, serta Mitra Bisnis atau Mitra Kerja dengan Pelaksanaan Kontrak dan Perjanjian Kerja, serta pelaksanaan program kemitraan, Bina Lingkungan bagi kepentingan masyarakat.

Keterlibatan pemangku kepentingan tipe rendah seperti Owner dengan pelaksanaan pelaporan kemajuan perusahaan, dan peningkatan kontrak kerja, Komunitas dengan mengadakan pertemuan dan diskusi dengan berbagai komunitas dan asosiasi, *Tenant* dan NGO dengan pelibatan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan, Kreditur seperti penyedia dokumen yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses kredit, dan pertimbangan kepentingan Pesaing. Pengungkapan keterlibatan pemangku kepentingan dalam laporan keberlanjutan entitas secara sistematis, jelas dan transparan diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran untuk perusahaan di masa depan serta meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Dari 4 tahap (identifikasi, prioritas, validasi dan review), peran dan keterlibatan pemangku kepentingan selalu dilibatkan terutama pada tahap prioritas dalam pemilihan topik material dengan bentuk keterlibatan pemangku kepentingan seperti pelaksanaan survei dan *Focus Group Discussion*.

Kemudian untuk menjawab pertanyaan penelitian terakhir terkait masalah material utama yang diidentifikasi melalui pengungkapan pada laporan keberlanjutan oleh perusahaan dalam sektor properti berdasarkan frekuensi penyebutannya dalam masing-masing laporan keberlanjutan oleh 15 perusahaan objek dalam penelitian ini, dapat digambarkan pada gambar grafik dibawah.



Gambar 4. Isu Sosial Utama yang dianggap material berdasarkan frekuensi penyebutan

Sumber: Data diolah penulis

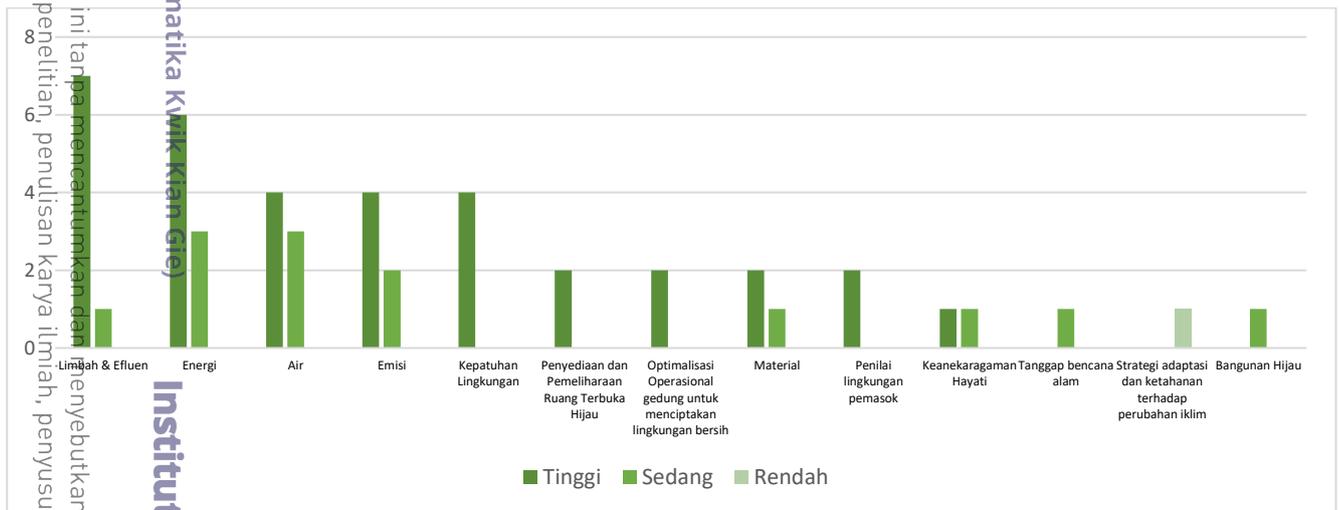
Ket:

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| A Kesehatan dan Keselamatan Kerja | M Pembangunan yang berkelanjutan | Z Kepuasan pelanggan |
| B Masyarakat Lokal | N Peningkatan Pengetahuan | AA Inovasi dan Pengembangan Teknologi |
| C Pelatihan dan Pendidikan Karyawan | O Kepatuhan sosial ekonomi | AB Verifikasi kepatuhan operasional |
| D Kepegawaian | P Program pengembangan SDM | AC Keterlibatan Karyawan |
| E Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan | Q Hubungan tenaga kerja dan manajemen | AD Keterlibatan pemangku kepentingan |
| F Keanekaragaman dan Kesempatan setara | R Produk dan layanan | AE Menyediakan dan Memfasilitasi Berbagai Jenis Transportasi umum |
| G Non Diskriminasi | S Pekerja Anak | AF Pemasok Lokal |
| H Penyediaan fasilitas dan layanan yang baik | T Keterlibatan Komunitas | AG Seleksi Mitra Kerja Operasional |
| I Pendidikan | U Manajemen Rantai Persediaan | |
| J Pemasaran dan pelabelan | V HAM | |
| K Kerja Paksa/Wajib Kerja | W Praktik Pengamanan | |
| L Privasi Pelanggan | X Hubungan industrial | |
| | Y Kebebasan berserikat | |



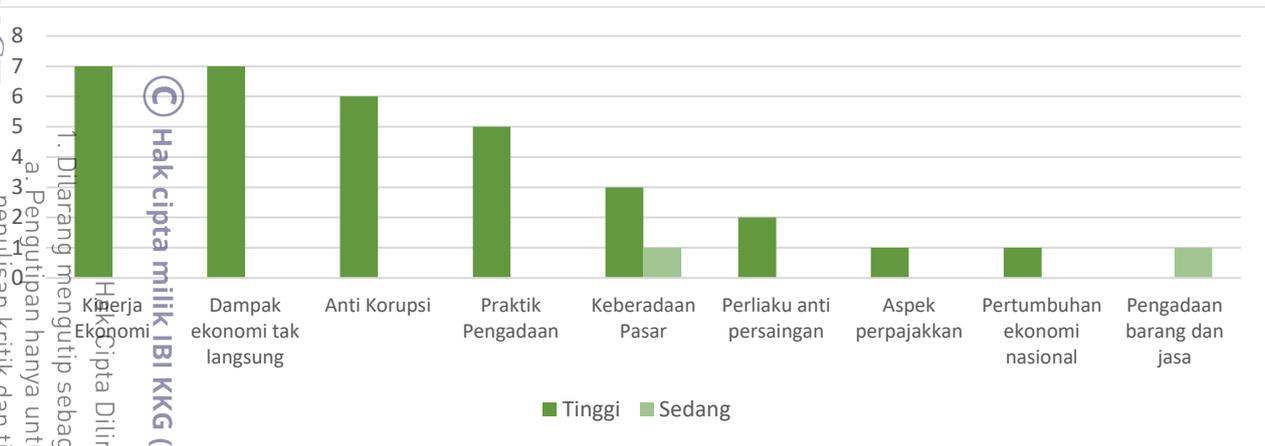
Isu atau topik keberlanjutan material yang diidentifikasi oleh perusahaan dan disampaikan dalam laporan keberlanjutan memiliki jumlah isu dan tingkat prioritas yang berbeda-beda, yang menunjukkan pendekatan pengujian materialitas yang digunakan oleh masing-masing perusahaan tidak sepenuhnya sama dan sangat tergantung oleh tantangan yang dihadapi masing-masing perusahaan yang mungkin berbeda, serta perbedaan keterlibatan pemangku kepentingan. Sebagaimana telah digambarkan pada pembahasan dalam penelitian ini, perusahaan yang telah mengidentifikasi topik material sudah membagi topik kedalam isu ekonomi, sosial, lingkungan, dan topik lainnya dengan variasi jumlah topik 10-27 topik. Dalam pembahasan, topik materialitas tingkat bawah (Lower Level) tidak dicantumkan karena dianggap tidak material.

Dari seluruh topik material yang disebutkan dalam laporan keberlanjutan, didapat 33 topik terkait isu sosial dengan topik utama dengan prioritas tinggi dan berdasarkan frekuensi penyebutan adalah kesehatan dan keselamatan kerja (9), masyarakat lokal (7), pelatihan dan pendidikan karyawan (6), ditambah topik lainnya terkait isu sosial yang juga disebutkan kurang atau sama dengan 5 kali dengan prioritas tinggi seperti kepegawaian, kesehatan dan keselamatan pelanggan, keanekaragaman dan kesempatan setara, non diskriminasi, penyediaan fasilitas dan layanan yang baik, pendidikan, pemasaran dan pelabelan, kerja paksa/wajib kerja, privasi pelanggan, pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan pengetahuan, kepatuhan sosial/ekonomi, program pengembangan sdm, hubungan tenaga kerja dan manajemen, produk dan layanan, pekerja anak, keterlibatan komunitas, manajemen rantai persediaan, ham, praktik pengamanan, hubungan industrial, kebebasan berserikat, kepuasan pelanggan, inovasi dan pengembangan teknologi, serta verifikasi kepatuhan operasional. Terdapat juga topik lainnya yang disebutkan namun prioritas rendah dan frekuensi penyebutannya kurang atau sama dengan 2 kali seperti keterlibatan karyawan, keterlibatan pemangku kepentingan, menyediakan dan memfasilitasi berbagai jenis transportasi umum, pemasok lokal, dan seleksi mitra kerja operasional.



Gambar 5. Isu Lingkungan Utama yang dianggap material berdasarkan frekuensi penyebutan
Sumber: Data diolah penulis

Kemudian, jumlah topik terkait isu lingkungan didapatkan sebanyak 12 topik. Dari 13 topik tersebut, terdapat topik utama dengan prioritas tinggi dan disebutkan lebih dari 5 kali yaitu topik Limbah & Efluen (7) dan Energi (6), serta topik dengan prioritas tinggi lainnya namun frekuensi penyebutannya kurang dari 6 kali seperti Air, Emisi, Kepatuhan Lingkungan, Penyediaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, Optimalisasi Operasional gedung untuk menciptakan lingkungan bersih, Material, Penilai lingkungan pemasok, serta Keanekaragaman Hayati. Selain topik keberlanjutan dengan prioritas tinggi, ada topik yang disebutkan dengan prioritas sedang kebawah seperti tanggap bencana alam, dan bangunan hijau. Terdapat juga identifikasi yang dilakukan terhadap isu lainnya seperti isu tata kelola seperti perilaku bisnis yang etis, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik, dan isu tata pemerintahan seperti kepatuhan terhadap seluruh persyaratan peraturan terkait.



Gambar 6. Isu Ekonomi Utama yang dianggap material berdasarkan frekuensi penyebutan
Sumber: Data diolah penulis

Ditemukan 9 topik terkait isu ekonomi yang disebutkan dengan topik utama yang paling sering disebut dengan prioritas tinggi adalah kinerja ekonomi (7), dampak ekonomi tak langsung (7), dan anti-korupsi (6), ditambah topik lainnya dengan prioritas sedang-tinggi namun disebutkan oleh kurang atau sama dengan dari 5 yaitu praktik pengadaan, Keberadaan pasar, Perilaku Anti Persaingan, Aspek Perpajakan, Pertumbuhan ekonomi nasional dan pengadaan barang dan jasa.

Topik material utama kinerja ekonomi dalam isu ekonomi dianggap penting karena merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun, anti-korupsi dianggap penting karena membuktikan tidak adanya penghambat bagi pertumbuhan perusahaan, dan dampak ekonomi tak langsung yang dianggap berpengaruh terhadap para pemangku kepentingan seperti masyarakat yang merupakan pemangku kepentingan utama sehingga perusahaan berusaha agar keberadaan perusahaan dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi pemangku kepentingan.

Kemudian topik utama material dalam isu sosial yaitu kesehatan dan keselamatan kerja dianggap penting karena lingkungan kerja yang layak serta aman merupakan kunci terhadap performa dan kinerja karyawan khususnya yang bekerja langsung di proyek-proyek pembangunan, masyarakat lokal dan pelatihan dan pendidikan karyawan dianggap penting karena berhubungan dengan pemangku kepentingan utama perusahaan. Sedangkan topik material utama terkait isu lingkungan yaitu limbah & efluen yang dianggap sebagai salah satu sumber utama kerusakan lingkungan dan energi dianggap penting karena dalam operasional setiap perusahaan masih menggunakan BBM seperti solar dan listrik yang sebagian besar masih menggunakan batubara sebagai pembangkit dan merupakan sumber energi tak terbarukan yang ketersediaannya terbatas.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan sudah menyampaikan definisi isu materialitas dalam laporan keberlanjutan. Terdapat variasi pada setiap perusahaan dalam mendefinisikan isu materialitas dalam laporan keberlanjutan. Variasi tersebut mencakup 15 kata kunci, dengan kata kunci utama berdasarkan frekuensi penyebutannya adalah dampak terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial. Pemangku kepentingan utama dalam sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan berdasarkan frekuensi penyebutan dalam laporan keberlanjutan adalah adalah Karyawan, Masyarakat, Pemerintah, serta Pemegang Saham. Peran para pemangku kepentingan utama dalam perusahaan disertakan melalui pengungkapan pada laporan keberlanjutan yang ditunjukkan dalam tabel keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap perusahaan secara detail dan disertai dengan respon dan tanggapan perusahaan dengan keterlibatan pemangku kepentingan paling banyak pada tahap prioritas penentuan topik material.

Simpulan terakhir, masalah material utama yang diidentifikasi melalui pengungkapan pada laporan keberlanjutan oleh sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan berdasarkan frekuensi penyebutan (diatas 5 kali) dan prioritas tinggi dalam isu ekonomi ialah Kinerja Ekonomi, Dampak Ekonomi Tak Langsung, dan Anti Korupsi, isu lingkungan ialah Limbah dan Efluen, serta Energi, dan isu sosial seperti Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Masyarakat Lokal, dan Pelatihan serta Pendidikan Karyawan.

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan seperti kurangnya informan langsung dari perusahaan yang diteliti sehingga disarankan untuk melakukan wawancara atau *interview* dengan praktisi dalam perusahaan yang akan diteliti sehingga diharapkan dapat mengetahui tantangan yang dihadapi perusahaan terkait materialitas dan laporan keberlanjutan yang tidak disebutkan dalam laporan dan disarankan untuk



memperluas objek penelitian tidak hanya di Indonesia namun dari seluruh dunia sehingga penelitian dapat mengungkapkan materialitas pada laporan keberlanjutan perusahaan properti, real estat, dan konstruksi bangunan secara umum di seluruh dunia.

Daftar Pustaka

- Aryal, N. (2017). *Materiality assessment in sustainability reporting: case study of the airline industry*. Jyväskylä University School of Business and Economics.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2014). *Teori Akuntansi International Financial Reporting Standards* (Issue 4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- GRI H02: Pengungkapan Umum 2016, 1 (2016).
- Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI 2016: 101 Landasan, Global Reporting Initiative 30 (2016).
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cetakan 1, Issue Maret). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Josua, R., Septiani, A., Akuntansi, D., Ekonomika, F., Diponegoro, U., Prof, J., & Sh, S. (2020). Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar pada BEI Tahun 2015-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9, 1–9.
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23119>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (Vol. 6).
- Siyoto, Dr. S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Audit Kontemporer*. Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, (2007).
- Uwuigbe, U., Teddy, O., Uwuigbe, O. R., Emmanuel, O., Asiriwa, O., Eyitomi, G. A., & Taiwo, O. S. (2018). Sustainability reporting and firm performance: A bi-directional approach. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(3), 1–16.